

Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2020-2023

Akhmad Sururi

Universitas Airlangga

akhmad.sururi-2022@feb.unair.ac.id

Abstrak

Salah satu komponen terpenting dalam menjalankan pemerintahan di daerah adalah keuangan daerah. Pemerintah kabupaten atau kota diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah mereka agar kinerja mereka dalam menjalankan tugas dapat dievaluasi. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menghitung rasio keuangan dari laporan realisasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 hingga 2023. Metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yang berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam aspek analisis belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangannya memiliki rasio kemandirian dikategorikan inklusif, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio aktivitas masih menitikberatkan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan yang mengalami naik turun. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan belanja daerah secara proporsional, menggali potensi penerimaan asli daerah dan peningkatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Kata Kunci

Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi yang besar dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan terkait menentukan APBD. Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu memperbaiki pelayanan dan mendorong peningkatan kesejahteraan umum di daerah tersebut. APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib, mentaati peraturan perundang-undangan, dilakukan secara efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. keseriusan upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diamati dari postur APBD yang ada. Dengan mengetahui postur APBD yang ada masyarakat akan mengetahui arah kebijakan

pemerintah daerah ke depan. Oleh sebab itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan dari pengelolaan keuangan tersebut.

Banyuwangi merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di provinsi Jawa Timur. Berikut data Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023.

Tabel 1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Pendapatan | | % |
|-------|--------------|---------------|---------|
| | Anggaran (m) | Realisasi (m) | |
| 2020 | 3234,61 | 3268,23 | 101,04% |
| 2021 | 3014,54 | 3181,21 | 105,53% |
| 2022 | 3181,06 | 3236,15 | 101,73% |
| 2023 | 3303,58 | 3374,67 | 102,15% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 1 nampak bahwa realisasi pendapatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai target yang dianggarkan

Tabel 2. Belanja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Belanja | | % |
|-------|--------------|---------------|--------|
| | Anggaran (m) | Realisasi (m) | |
| 2020 | 3417,59 | 3140,64 | 91,90% |
| 2021 | 3314,73 | 3093,59 | 93,33% |
| 2022 | 3559,88 | 3327,25 | 93,47% |
| 2023 | 3748,54 | 3617,37 | 96,50% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah belanja kabupaten banyuwangi tidak mencapai target yang dianggarkan.

Tabel 3. Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Realisasi | | Selisih (m) | keterangan |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | Pendapatan (m) | Belanja (m) | | |
| 2020 | 3268,23 | 3140,64 | 127,59 | Surplus |
| 2021 | 3181,21 | 3093,59 | 87,62 | Surplus |
| 2022 | 3236,15 | 3327,25 | -91,10 | Defisit |
| 2023 | 3374,67 | 3617,37 | -242,70 | Defisit |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami defisit yang cukup signifikan pada 2 tahun terakhir. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian masyarakat dikarenakan pendapatan pada tahun tersebut tidak mampu menutup belanja pada tahun berjalan. pemerintah kabupaten banyuwangi diharuskan mencari sumber pembiayaan yang lain menutup defisit tersebut. Dengan 2 tahun terakhir kinerja keuangan yang selalu mengalami defisit akan menimbulkan pertanyaan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program di tahun-tahun berikutnya.

LANDASAN TEORI

Keuangan Daerah

Mardiasmo (2021) dalam Syam & Zulfikar (2022) menjelaskan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu dikenal sebagai keuangan daerah. Selain itu, alat utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan adalah anggaran daerah, yang sering disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta semua aset terkait. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua tanggung jawab dan hak pemerintah daerah terkait dengan uang (rupiah) yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam keuangan daerah.

Kinerja keuangan Daerah

Organisasi sektor publik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi swasta. Beberapa perbedaan karakteristik tersebut antara lain meliputi tujuannya yang mengarah kepada non profit oriented, struktur organisasinya lebih birokratis, kaku, serta rentan terhadap perubahan lingkungan. Sehubungan dengan perbedaan karakteristik tersebut sistem pengukuran kinerja yang selama ini sering dipergunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi sektor swasta seyogyanya disesuaikan terlebih dahulu sebelum dipakai pada organisasi sektor publik. Rivai (2020) kinerja merupakan pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan oleh seseorang pada periode tertentu yang disandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya kinerja sebagai pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan, dalam. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikasi berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan organisasinya. (Firmansyah, 2024)

Pengukuran Kinerja Keuangan daerah

Rumangu et al. (2023) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai sesuatu yang teramat penting bagi organisasi, pengukuran dapat dipakai dalam melakukan penilaian tingkat kesuksesan suatu organisasi dan dijadikan dasar bagi organisasi dalam Menyusun *reward* atas keberhasilan capaian serta mampu dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Ini mengimplikasikan bahwa semua aktivitas organisasi harus dapat diukur dan dijustifikasi dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk menunjukkan relevansinya dengan arah organisasi di masa depan. Jika barang dan jasa yang dihasilkan tidak membantu organisasi mencapai tujuannya, maka barang dan jasa tersebut akan memiliki nilai yang sedikit.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Cholil (2021) menjelaskan analisis rasio keuangan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi diantaranya manajemen yang ada dalam organisasi membutuhkan suatu alat yang mampu mengukur kinerja keuangan organisasi sehingga hasil pengukuran tersebut dapat digunakan manajemen organisasi dalam menyusun perencanaan dengan membandingkan rata-rata capaian organisasi yang lain, sedangkan bagi pemberi modal akan mampu memetakan risiko yang akan dihadapi berkaitan dengan kemampuan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjamannya. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ini digunakan analisis rasio keuangan. Teknik analisis kinerja keuangan daerah yang dipakai oleh peneliti adalah rasio kemandirian daerah, efektifitas dan efisiensi, aktivitas, serta pertumbuhan (Halim, 2012).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) (Halim, 2012). Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang ada.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Daerah | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|------------------|-----------------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0 – 25 | Instruktif |
| Rendah | 25 – 50 | Konsultif |
| Sedang | 50 – 75 | Partisipatif |
| Tinggi | 75 – 100 | Delegatif |

Sumber : (Halim, 2012)

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menunjukkan perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. (Halim, 2012).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

| Efektifitas Keuangan Daerah | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Di atas 100% | Sangat efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup efektif |
| 60% - 80% | Kurang efektif |
| Di bawah 60 % | Tidak efektif |

Sumber : (Halim, 2012)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan bagaimana perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Ketika rasio pemungutan pendapatan pemerintah daerah kurang dari seratus persen, hal ini dianggap efisien. Kinerja yang dicapai semakin baik jika rasio efisiensi semakin rendah. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas upaya pemungutan pendapatan, pemerintah daerah harus menghitung secara cermat jumlah total biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima(Halim, 2012).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

| Efisiensi Keuangan Daerah | Kriteria |
|---------------------------|----------------|
| Di atas 100% | Tidak efisien |
| 90% sampai dengan 100% | Kurang efisien |
| 80% sampai dengan 90% | Cukup efisien |
| 60% sampai dengan 80% | Efisien |
| Di bawah 60% | Sangat efisien |

Sumber : (Halim, 2012)

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan sejauh mana pemerintahan daerah menggunakan alokasi dananya untuk belanja operasi ataupun belanja modal secara optimal. Tidak terdapat kriteria yang pasti

terkait besaran prosentase yang ideal terhadap belanja operasi maupun belanja modal. Hal tersebut juga dikarenakan besaran belanja operasi dan modal juga sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pembangunan dan besarnya nilai investasi. Hal tersebut nampak seperti saat masa pandemi covid 19, saat itu pemerintah lebih cenderung mengucurkan belanja operasi agar perputaran uang di masyarakat berjalan lancar.

Rasio Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menghitung sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya dari waktu ke waktu. Dengan menganalisis pertumbuhan tiap-tiap item dalam pos pendapatan dan pengeluaran, dapat ditentukan area mana yang memerlukan perhatian lebih besar. Di Indonesia, misalnya, pemerintah daerah mungkin memprioritaskan peningkatan pendapatan terkait pariwisata di daerah seperti Bali atau Yogyakarta, di mana pendapatan dari sektor ini sangat penting bagi pengembangan daerah. Pertumbuhan sektor ini harus dipantau dan dianalisis untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan di masa depan. (Halim, 2012).

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun ini} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ \text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan tahun ini} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Belanja Operasi tahun ini} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Penerimaan Belanja Operasi tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal tahun ini} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya}} \times 100\% \end{aligned}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Cara ini menggunakan rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari membandingkan antara target dengan Realisasi yang termuat dalam LRA pemerintah kabupaten Banyuwangi tahun 2020 – 2023. Metode ini menggunakan indikator rasio kemandirian daerah, Rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan untuk menilai tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio kemandirian Daerah diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | PAD (m) | Pendapatan daerah (m) | Rasio kemandirian | Keterangan |
|------------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 482,74 | 3.268,23 | 14,77% | Instruktif |
| 2021 | 520,02 | 3.181,21 | 16,35% | Instruktif |
| 2022 | 516,76 | 3.236,15 | 15,97% | Instruktif |
| 2023 | 567,75 | 3.374,67 | 16,82% | Instruktif |
| total | | | 63,91% | |
| rata-rata | | | 15,98% | Instruktif |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 hingga 2023 rata-rata mencapai angka yang relatif rendah sebesar 15,98%, Ini memberikan gambaran yang jelas bahwa pemerintah kabupaten banyuwangi masih sangat menggantungkan pada aliran bantuan dari pusat dalam menutup biaya program kegiatannya. Tahun 2020, rasio kemandirian adalah 14,77%; pada tahun 2021, meningkat menjadi 16,35%. Rasio tersebut meningkat dari 15,97% pada tahun 2022 menjadi 16,82% pada tahun 2023. Pola kemandirian keuangan Kabupaten Banyuwangi berada dalam kisaran 0%–25%, yaitu dikategorikan instruktif, peran aliran bantuan pemerintah pusat Nampak dominan dibandingkan dengan PAD.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas

Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio efektifitas :

Tabel 8. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Realisasi PAD | Target PAD | Rasio Efektifitas | keterangan |
|------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| 2020 | 482,74 | 565,19 | 85,41% | cukup efektif |
| 2021 | 520,02 | 505,89 | 102,79% | sangat efektif |
| 2022 | 516,76 | 526,71 | 98,11% | Efektif |
| 2023 | 567,75 | 576,58 | 98,47% | Efektif |
| total | | | 384,78% | |
| rata-rata | | | 96,20% | Efektif |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Berdasarkan informasi tabel 8, rasio efektifitas Kabupaten Banyuwangi dikategorikan efektif karena masuk dalam interval 0% hingga 25% yakni dengan rata-ratanya sebesar 96,20%.

Rasio Efisiensi

Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio efisiensi :

Tabel 9. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Belanja Daerah | Pendapatan daerah | Rasio Efisiensi | keterangan |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 2020 | 3.140,64 | 3.268,23 | 96,10% | kurang efisien |
| 2021 | 3.093,59 | 3.181,21 | 97,25% | kurang efisien |
| 2022 | 3.327,25 | 3.236,15 | 102,82% | tidak efisien |
| 2023 | 3.617,37 | 3.374,67 | 107,19% | tidak efisien |

| | | | | |
|-----------|--|--|---------|---------------|
| total | | | 403,35% | |
| rata-rata | | | 100,84% | tidak efisien |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 – 2023 adalah 100,84%. Sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah, tingkat efisiensi Pemerintah kabupaten Banyuwangi berada pada interval di atas 1 atau memiliki kinerja yang tidak efisien. Tahun 2020 dan 2021 dikategorikan “tidak efisien” karena berada nilainya di kisaran 90%-100%. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja yang “tidak efisien” karena berada pada interval lebih dari 1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memungut pendapatannya dikategorikan tidak efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas Operasi

Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio aktivitas operasi :

Tabel 10. Rasio aktivitas operasi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Belanja Operasi | Belanja Daerah | Rasio Belanja Operasi |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 2020 | 2.102,95 | 3.140,64 | 66,96% |
| 2021 | 1.986,20 | 3.093,59 | 64,20% |
| 2022 | 2.233,86 | 3.327,25 | 67,14% |
| 2023 | 2.339,02 | 3.617,37 | 64,66% |
| Total | | | 262,96% |
| rata-rata | | | 65,74% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Rasio Aktivitas Modal

Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio aktivitas modal :

Tabel 11. Rasio aktivitas Modal Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Belanja Modal | Belanja Daerah | Rasio Belanja Modal |
|-----------|---------------|----------------|---------------------|
| 2020 | 553,40 | 3.140,64 | 17,62% |
| 2021 | 661,10 | 3.093,59 | 21,37% |
| 2022 | 679,24 | 3.327,25 | 20,41% |
| 2023 | 843,58 | 3.617,37 | 23,32% |
| total | | | 82,73% |
| rata-rata | | | 20,68% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Sebagaimana terlihat dari perhitungan rasio aktivitas pada tabel 9, lebih dari 50% belanja dialokasikan untuk belanja operasi, Hal ini mengakibatkan rasio belanja modal lebih rendah. Pada tahun 2020, proporsi belanja modal terhadap belanja operasi adalah 17,62% dibandingkan dengan 66,96%. Pada tahun 2021, 64,20% dari belanja adalah belanja operasi, dan 21,37% adalah belanja modal. Pada tahun 2022, 20,41% dari belanja adalah belanja modal, sedangkan 67,14% adalah belanja operasi. Pada tahun 2023, 23,32% dari belanja adalah belanja modal, sedangkan 64,66% adalah belanja operasi.

Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan Rasio Aktivitas Operasi diperlihatkan sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan PAD

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Penerimaan PAD tahun ini- tahun sebelumnya | Penerimaan PAD tahun sebelumnya | Rasio pertumbuhan PAD |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------------|
| 2020 | -12,95 | 495,69 | -2,61% |
| 2021 | 37,28 | 482,74 | 7,72% |
| 2022 | -3,26 | 520,02 | -0,63% |
| 2023 | 50,99 | 516,76 | 9,87% |
| total | | | 14,35% |
| rata-rata | | | 3,59% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 13. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Pendapatan daerah tahun ini – tahun sebelumnya | Pendapatan daerah tahun sebelumnya | Rasio Pertumbuhan PAD |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------|
| 2020 | 124,95 | 3.143,28 | 3,98% |
| 2021 | -87,02 | 3.268,23 | -2,66% |
| 2022 | 54,94 | 3.181,21 | 1,73% |
| 2023 | 138,52 | 3.236,15 | 4,28% |
| total | | | 7,32% |
| rata-rata | | | 1,83% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Tabel 14. Rasio Pertumbuhan belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Belanja Operasi tahun ini- tahun sebelumnya | Belanja Operasi tahun sebelumnya | Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi |
|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2020 | 13,80 | 2.089,15 | 0,66% |
| 2021 | -116,75 | 2.102,95 | -5,55% |
| 2022 | 247,66 | 1.986,20 | 12,47% |
| 2023 | 105,16 | 2.233,86 | 4,71% |
| total | | | 12,29% |
| rata-rata | | | 3,07% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Tabel 15. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

| Tahun | Belanja Modal tahun ini– tahun sebelumnya | belanja modal tahun sebelumnya | Rasio Pertumbuhan Belanja Modal |
|---------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2020 | 23,86 | 529,54 | 4,51% |
| 2021 | 107,70 | 553,40 | 19,46% |
| 2022 | 18,14 | 661,10 | 2,74% |
| 2023 | 164,34 | 679,24 | 24,19% |
| total | | | 50,91% |
| rata- rata | | | 12,73% |

Sumber : LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 (diolah)

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2020 – 2023 mengalami kondisi naik turun. Terutama pertumbuhan pendapatan, ada kecenderungan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami ketidakstabilan dikarenakan pada tahun-tahun tersebut seluruh pemerintah daerah berfokus pada penanganan pandemi covid 19. Namun demikian secara keseluruhan dari tahun ke tahun Pemerintah kabupaten Banyuwangi mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal sama juga terjadi jika dilihat dari sisi pertumbuhan total pendapatan, secara keseluruhan pertumbuhan total pendapatan juga mengalami kondisi naik dan turun. Kenaikan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 4,28% dan penurunan pendapatan yang terendah terjadi tahun 2021 yakni 2,66%.

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam studi yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2023) mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin antara tahun 2018 dan 2021, rasio kemandirian diklasifikasikan sebagai rendah dan menunjukkan pola hubungan yang berguna. Rasio rata-ratanya sebesar 8,14%. Penelitian ini juga menemukan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki kinerja keuangan yang rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 15,98%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Pemerintah daerah yang mampu mencapai realisasi pendapatan yang lebih baik menunjukkan semakin baik capaian kinerjanya Saifrizal (2022). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu untuk memikirkan optimalisasi potensi penerimaan asli daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan pembiayaan mandiri dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengembangkan beberapa sektor pendapatan yang dapat dioptimalkan seperti

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Capaian rasio efektifitas pemerintah kabupaten Banyuwangi yang dikategorikan efektif menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten Banyuwangi mampu mencapai target pencapaian Pendapatan asli daerah. Pemkab Banyuwangi juga perlu meninjau apakah target yang ditetapkan tersebut sudah mencerminkan potensi maksimal daerahnya. Meskipun capaian rasio efektifitasnya sudah dikategorikan efektif, Pemkab Banyuwangi perlu mempertahankan maupun meningkatkan keefektifitasnya dengan cara mendorong masuknya pendapatan asli daerah agar mencapai optimalisasi penerimaan seperti dari sektor perpajakan dan retribusi daerah.

Selanjutnya jika dilihat dari rasio efisiensi, capaian kinerja keuangan Pemkab Banyuwangi dikategorikan tidak efisien. Hal tersebut disebabkan rata-rata selama 4 tahun terakhir risiko efisiensi sebesar 100,84% atau total belanja melebihi dari total pendapatan dalam APBD. Ghofar

et al. (2023) kecenderungan bagi pemerintah daerah yang menggunakan anggaran defisit mengharuskan pemerintah daerah mengatasinya dengan perhatian yang serius. Pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak boleh secara terus menerus bergantung kepada aliran dana dari luar. Pemerintah kabupaten Banyuwangi perlu untuk meningkatkan potensi pendapatan dan melakukan efisiensi dalam pengeluaran belanjanya sehingga tidak sampai terjadi defisit anggaran.

Rasio Aktivitas

berdasarkan rasio aktivitas Pemerintah kabupaten Banyuwangi memprioritaskan belanja operasi dibandingkan pengeluaran untuk belanja modal. Akib et al. (2024) dikarenakan belanja modal memiliki sifat yang lebih berorientasi kepada jangka Panjang maka pemerintah daerah wajib lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur daripada belanja konsumtif. Belanja pegawai perlu ditekan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar belanja modal dan kepentingan masyarakat kabupaten Banyuwangi dapat ditingkatkan. Hal tersebut perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan analisis risiko diketahui bahwa pertumbuhan APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2020–2023 mengalami kondisi naik turun. Meskipun secara rata-rata bernilai positif namun secara keseluruhan dari tahun ke tahun Pemerintah kabupaten Banyuwangi mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal sama juga terjadi jika dilihat dari sisi pertumbuhan total pendapatan, secara keseluruhan pertumbuhan total pendapatan juga mengalami kondisi naik dan turun. Kenaikan rasio pertumbuhan tersebut tidak serta merta menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Rasio pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh menguntungkan terhadap kemandirian PAD (Rakasiwi, 2024). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya.. Pemerintah kabupaten Banyuwangi masih bisa meningkatkan rasio pertumbuhannya yakni dengan cara menggali potensi penerimaan asli daerahnya

Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu mengatasi beberapa hambatan dalam upaya menaikkan pendapatannya yang signifikan antara lain masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah dan pelaksanaan sosialisasi terutama terkait tempat-tempat wisata yang menjadi obyek penerimaan daerah, dan belum optimalnya sosialisasi terkait pemahaman mekanisme pengurusan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat, menyebabkan proses penyelesaiannya lambat, sehingga mempengaruhi penerimaan retribusinya.

KESIMPULAN

Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan pola hubungan instruktif menggambarkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal. Namun, capaian rasio efektivitas yang cukup baik perlu dipertahankan melalui upaya-upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Di sisi lain, efisiensi keuangan yang rendah menunjukkan pengeluaran melebihi pendapatannya, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan pengembangan potensi pendapatan asli daerah agar tidak terjadi defisit secara terus menerus. Besarnya alokasi anggaran belanja operasi dibandingkan belanja modal juga menjadi perhatian, perlu adanya pengendalian terhadap belanja pegawai untuk meningkatkan belanja modal sehingga mampu memberikan manfaat lebih bagi pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada akhirnya perlu membangun lingkungan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan APBD sehingga pengelolaan pembangunan menjadi lebih efisien dan transparan, didukung oleh sistem akuntansi pemerintahan yang akurat dan tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pemerintah kabupaten banyuwangi yang melalui melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara berkala mempublikasikan laporan keuangan daerah tahunan hasil audit melalui media online dan ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada keluarga serta teman - teman yang mendorong agar tulisan ini cepat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & Fitriyani. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 09(01), 2088–4656. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- BPKAD. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 Audited. *Banyuwangi*.
- BPKAD. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 Audited. *Banyuwangi*.
- BPKAD. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 Audited. *Banyuwangi*.
- BPKAD. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 Audited. *Banyuwangi*.
- Cholil, A. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan PT Berlina Tbk Tahun 2014-2019. *JEMSI*, 2(3).
- Firmansyah, A. (2024). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan dan Ukuran Daerah Indonesia Local Government Financial Performance: Capital Expenditure, Regional Dependence And Regional Size. In *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* (Vol. 6, Issue 1). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Ghofar, A., Eryanto, D., & Lestari, T. R. (2023). *Manajemen Kas Daerah (Teori dan Praktik)* (Vol. 1).
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In *Edisi Empat* (Empat, Issue 2). Salemba Empat. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Menteri Dalam Negeri. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Jakarta*.
- Rakasiwi, F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(1), 98–107.
- Ramadhan, A., Sam, I., & Fredy, O. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4), 104–118.
- Rivai, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(2), 213–223. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i2.5291>
- Rumangu, mario, Hendrik, M., & Rondonuwu, S. (2023). Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan Balanced Scorecard Pada PT Alhas Jaya Group. *Jurnal EMBA*, 11(2), 464–475.
- Saifrizal, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Di Kabupaten Bireuen. *Knowledge : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202–211.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Republik indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*